

***Civic Knowledge* dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Implikasinya terhadap Pembentukan Warga Negara Demokratis**

Siti Anida Safira

Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Politeknik Manufaktur Bandung Jl.
Kanayakan No.21, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Email: 222442021@mhs.polman-bandung.ac.id

Abstrak

Civic Knowledge dipahami sebagai dimensi kognitif kewarganegaraan yang mencakup pemahaman tentang sistem politik dan pemerintahan, hukum dan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, serta ideologi Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap jurnal ilmiah nasional periode 2020–2025 yang relevan dengan kajian *Civic Knowledge* dan Pendidikan Kewarganegaraan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan mengidentifikasi konsep utama, temuan, dan argumentasi dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Civic Knowledge* merupakan komponen esensial dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang berperan penting dalam membentuk pemahaman rasional, partisipasi demokratis yang sadar, kesadaran hukum, serta orientasi kebangsaan warga negara. *Civic Knowledge* berkontribusi dalam membentuk warga negara demokratis yang mampu menyikapi dinamika sosial dan politik secara kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mengembangkan *Civic Knowledge* melalui pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada isu-isu aktual. Penguatan *Civic Knowledge* dipandang sebagai kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer, seperti rendahnya literasi politik, disinformasi, dan polarisasi sosial, guna mendukung kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Civic Knowledge*, Pendidikan Kewarganegaraan, Warga Negara Demokratis, Demokrasi, Pancasila

Abstract

Civic Knowledge is understood as the cognitive dimension of citizenship, encompassing an understanding of political and governmental systems, law and the constitution, citizens' rights and obligations, democratic values, and the ideology of Pancasila. This research employs a qualitative approach using a literature review method by examining national scientific journals published between 2020 and 2025 that are relevant to *Civic Knowledge* and Civic Education. Data were analyzed through content analysis by identifying key concepts, findings, and arguments across selected studies to develop a comprehensive and integrated understanding. The findings indicate that *Civic Knowledge* is an essential component of Civic Education that plays a significant role in fostering rational understanding, conscious democratic participation, legal awareness, and national orientation among citizens. *Civic Knowledge* contributes to the development of democratic citizens who are able to respond to social and political dynamics critically, tolerantly, and responsibly. Civic Education holds a strategic role in strengthening *Civic Knowledge* through contextual, participatory learning approaches that address contemporary issues. Strengthening *Civic Knowledge* is considered an urgent necessity in addressing contemporary democratic challenges, such as low political literacy, disinformation, and social polarization, in order to support the quality of democracy in Indonesia.

Keywords: *Civic Knowledge*; Civic Education; Democratic Citizens; Democracy; Pancasila



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena diarahkan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan,

sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang utuh dalam kehidupan demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran pengetahuan mengenai negara, konstitusi, dan sistem politik, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kompetensi warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika sosial serta politik di era disrupsi digital (Maulana, 2025). Posisi tersebut menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dan mata kuliah strategis dalam membangun kualitas demokrasi melalui jalur pendidikan formal.

Salah satu komponen utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan langsung dengan dimensi kognitif kewarganegaraan adalah *Civic Knowledge*. *Civic Knowledge* dipahami sebagai pengetahuan warga negara mengenai prinsip dasar kewarganegaraan, sistem politik dan pemerintahan, hukum dan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Armizah, 2020; Nugraha & Elan, 2024). Pemahaman *Civic Knowledge* menjadi prasyarat penting dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang rasional, karena kualitas partisipasi warga negara sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman terhadap sistem dan nilai kewarganegaraan yang dianut. Berbagai kajian menunjukkan bahwa keterbatasan *Civic Knowledge* berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Warga negara yang tidak memiliki pemahaman kewarganegaraan yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme demokrasi, kurang kritis terhadap kebijakan publik, serta rentan terhadap disinformasi dan manipulasi politik, khususnya dalam ruang digital yang semakin terbuka (Hartino & Adha, 2020; Maulana, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Civic Knowledge* memiliki implikasi langsung terhadap kualitas praktik demokrasi, bukan hanya pada ranah kognitif semata.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memperluas tantangan dalam penguatan *Civic Knowledge* melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Akses informasi politik dan kewarganegaraan yang semakin terbuka tidak selalu diiringi dengan kemampuan literasi kewarganegaraan yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa peserta didik dan warga negara muda yang memiliki *Civic Knowledge* rendah cenderung kesulitan melakukan verifikasi informasi serta membedakan antara fakta, opini, dan propaganda politik di media sosial (Hartino & Adha, 2020). Situasi ini mempertegas kebutuhan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menekankan penguatan pemahaman konseptual *Civic Knowledge* secara kritis dan kontekstual. Sejumlah penelitian di bidang Pendidikan Kewarganegaraan mengungkapkan bahwa *Civic Knowledge* dapat dikembangkan melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan konteks sosial. Model pembelajaran *controversial issues*, *case method*, *blended learning*, serta pendekatan berbasis literasi kewarganegaraan terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap isu-isu kewarganegaraan secara lebih mendalam dan reflektif (Armizah, 2020; Jamaludin & Alanur, 2021; Cahyono et al., 2023; Kollo et al., 2024). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa *Civic Knowledge* bukan merupakan kemampuan yang bersifat statis, melainkan dapat dikembangkan secara sistematis melalui strategi pembelajaran yang tepat dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam membentuk *Civic Knowledge* warga negara. Kurikulum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan abad ke-21 dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan kewarganegaraan dengan penguatan nilai, keterampilan berpikir kritis, serta kesadaran demokratis dalam menghadapi tantangan global (Jayadiputra et al., 2023; Suriaman et al., 2024). Kurikulum yang menempatkan *Civic Knowledge* sebagai bagian dari sistem pengetahuan terintegrasi memungkinkan Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi secara signifikan dalam membentuk warga negara yang tidak hanya patuh secara normatif, tetapi juga sadar secara rasional terhadap peran dan tanggung

jawabnya. Meskipun berbagai penelitian telah membahas *Civic Knowledge* dalam Pendidikan Kewarganegaraan, kajian yang secara khusus menelaah implikasi *Civic Knowledge* terhadap pembentukan warga negara demokratis secara komprehensif masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih berfokus pada peningkatan hasil belajar atau efektivitas model pembelajaran, sementara keterkaitan *Civic Knowledge* dengan kualitas kewarganegaraan demokratis belum banyak dianalisis secara sistematis (Jamaludin & Alanur, 2021; Nugraha & Elan, 2024). Kesenjangan kajian tersebut membuka ruang bagi penelitian yang mengintegrasikan berbagai temuan ilmiah untuk memahami peran *Civic Knowledge* secara lebih utuh.

Berdasarkan fokus kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Civic Knowledge* dalam Pendidikan Kewarganegaraan serta implikasinya terhadap pembentukan warga negara demokratis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur terhadap jurnal ilmiah nasional periode 2020–2025 dengan tujuan memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, dan kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi dan karakter kewarganegaraan.

Landasan Teoritis

***Civic Knowledge* dalam Pendidikan Kewarganegaraan**

Civic Knowledge merupakan salah satu komponen utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pada penguasaan pengetahuan dasar mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis. *Civic Knowledge* mencakup pemahaman tentang sistem politik dan pemerintahan, konstitusi, hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi yang menjadi pedoman dalam kehidupan publik (Armizah, 2020; Nugraha & Elan, 2024). Pengetahuan tersebut berfungsi sebagai dasar kognitif bagi warga negara dalam memahami posisi, peran, dan tanggung jawabnya dalam negara demokratis. Dalam kerangka Pendidikan Kewarganegaraan, *Civic Knowledge* tidak dipahami sebagai hafalan konsep normatif semata, melainkan sebagai pengetahuan yang bersifat aplikatif dan kontekstual. *Civic Knowledge* diharapkan mampu membentuk cara berpikir warga negara dalam menafsirkan persoalan kebangsaan dan demokrasi secara rasional (Jamaludin & Alanur, 2021). Pemahaman kewarganegaraan yang baik memungkinkan warga negara untuk menilai kebijakan publik, memahami proses politik, serta menyikapi dinamika sosial secara kritis dan bertanggung jawab. Beberapa kajian menempatkan *Civic Knowledge* sebagai prasyarat awal dalam pembentukan kompetensi kewarganegaraan secara utuh. Tanpa *Civic Knowledge* yang memadai, pengembangan sikap kewarganegaraan dan keterampilan partisipatif berpotensi berjalan tidak optimal (Maulana, 2025). Posisi tersebut menunjukkan bahwa *Civic Knowledge* memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang berorientasi pada nilai demokrasi dan keadilan sosial.

***Civic Knowledge* sebagai Dimensi Kognitif Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan secara konseptual dibangun atas tiga dimensi utama, yaitu *Civic Knowledge*, civic skills, dan civic values atau civic disposition. *Civic Knowledge* menempati dimensi kognitif yang berfungsi sebagai fondasi pemahaman warga negara terhadap sistem kewarganegaraan (Nugraha & Elan, 2024). Dimensi ini berkaitan langsung dengan kemampuan memahami konsep, prinsip, dan aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic Knowledge* berperan dalam membentuk kemampuan berpikir kritis warga negara terhadap isu-isu publik. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat *Civic Knowledge* yang baik cenderung memiliki kemampuan analitis yang lebih tinggi dalam

menyikapi informasi politik, termasuk kemampuan memilah informasi yang valid dan menolak disinformasi (Hartino & Adha, 2020). Hal ini menjadi semakin relevan di era digital, ketika arus informasi politik berkembang dengan sangat cepat dan tidak selalu disertai dengan akurasi yang memadai. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan abad ke-21 dirancang untuk mengintegrasikan *Civic Knowledge* dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan penguatan nilai demokrasi. Integrasi tersebut bertujuan agar pengetahuan kewarganegaraan tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi mampu diterapkan dalam konteks sosial yang nyata (Jayadiputra et al., 2023; Suriaman et al., 2024). Dengan demikian, *Civic Knowledge* berfungsi sebagai kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan kewarganegaraan yang rasional dan etis.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pembelajaran *Civic Knowledge*

Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai sarana pembelajaran dalam pengembangan *Civic Knowledge* melalui proses pembelajaran yang terencana dan sistematis. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk membangun pemahaman kewarganegaraan yang komprehensif melalui pengkajian isu-isu aktual, analisis kasus, serta diskusi kritis mengenai persoalan kebangsaan (Jamaludin & Alanur, 2021). Pendekatan tersebut memungkinkan peserta didik mengaitkan konsep *Civic Knowledge* dengan realitas sosial yang dihadapi. Berbagai model pembelajaran telah dikembangkan untuk meningkatkan *Civic Knowledge* dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Model controversial issues, case method, blended learning, dan value clarification technique terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep kewarganegaraan secara reflektif dan kritis (Armizah, 2020; Cahyono et al., 2023; Nurfaizah et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan *Civic Knowledge* sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan. Selain pendekatan pembelajaran, konteks kurikulum dan lingkungan pendidikan juga berperan dalam penguatan *Civic Knowledge*. Pendidikan Kewarganegaraan yang dirancang sebagai sistem pengetahuan terintegrasi memungkinkan peserta didik memahami hubungan antara nilai Pancasila, demokrasi, dan praktik kewarganegaraan secara utuh (Suriaman et al., 2024). Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi tersebut berkontribusi dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan demokratis.

Implikasi *Civic Knowledge* terhadap Pembentukan Warga Negara Demokratis

Civic Knowledge memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan warga negara demokratis karena berpengaruh pada cara individu memahami dan menjalankan perannya dalam kehidupan publik. Pengetahuan kewarganegaraan yang memadai mendorong warga negara untuk berpartisipasi secara sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi (Tuharea, 2022). Partisipasi tersebut tidak hanya tercermin dalam pemilu, tetapi juga dalam keterlibatan sosial dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Hubungan antara *Civic Knowledge* dan kesadaran hukum menunjukkan bahwa pemahaman kewarganegaraan memengaruhi perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Arfianti dan Kurniawan (2024) menunjukkan adanya keterkaitan antara *Civic Knowledge* dan kesadaran hukum berlalu lintas, yang menegaskan bahwa pengetahuan kewarganegaraan berkontribusi pada pembentukan perilaku tertib dan bertanggung jawab. *Civic Knowledge* juga berperan dalam membangun karakter kebangsaan dan kepedulian terhadap kepentingan umum (Kurniawan et al., 2025). Dalam konteks demokrasi inklusif, *Civic Knowledge* berperan dalam meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak kelompok rentan dan minoritas. Pendidikan Kewarganegaraan berbasis civic philanthropy dan pendekatan pendidikan inklusif menunjukkan bahwa pemahaman kewarganegaraan yang komprehensif mendorong

penghormatan terhadap hak politik penyandang disabilitas serta penguatan nilai keadilan sosial (Nanggala et al., 2024; Puspitaningrum et al., 2025). Implikasi tersebut menegaskan bahwa *Civic Knowledge* tidak hanya membentuk individu yang taat secara normatif, tetapi juga warga negara yang demokratis dan berkeadaban.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji *Civic Knowledge* dalam Pendidikan Kewarganegaraan serta implikasinya terhadap pembentukan warga negara demokratis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman konseptual, pemaknaan teoretis, dan analisis argumentatif terhadap gagasan-gagasan ilmiah yang berkembang dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Studi literatur memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam konsep *Civic Knowledge*, posisi strategisnya dalam Pendidikan Kewarganegaraan, serta relevansinya dalam konteks demokrasi kontemporer sebagaimana dibahas dalam penelitian terdahulu.

Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional yang terbit pada rentang tahun 2020–2025 dan relevan dengan topik *Civic Knowledge*, Pendidikan Kewarganegaraan, literasi kewarganegaraan, serta pembentukan warga negara demokratis. Seluruh sumber data berasal dari jurnal yang telah terverifikasi dan dapat diakses melalui Google Scholar, meliputi jurnal nasional terakreditasi dan prosiding ilmiah bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pemilihan jurnal nasional dilakukan untuk menjaga kesesuaian konteks kajian dengan sistem pendidikan, nilai Pancasila, dan dinamika demokrasi di Indonesia.

Metode Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Setiap artikel dianalisis dengan mengidentifikasi konsep utama, temuan, dan argumentasi yang berkaitan dengan *Civic Knowledge*, peran Pendidikan Kewarganegaraan, serta implikasinya terhadap pembentukan warga negara demokratis. Proses analisis dilakukan melalui tahapan membaca kritis, pengelompokan tema, dan sintesis temuan antarartikel untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan penelitian dengan kerangka teoretis Pendidikan Kewarganegaraan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya menggunakan data sekunder berupa literatur ilmiah, sehingga tidak menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Fokus penelitian yang hanya menggunakan jurnal nasional juga menyebabkan kajian ini tidak membandingkan perkembangan *Civic Knowledge* dalam perspektif internasional. Selain itu, interpretasi terhadap literatur berpotensi dipengaruhi oleh sudut pandang peneliti, sehingga hasil penelitian lebih bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan untuk generalisasi luas. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi relevansi penelitian ini sebagai dasar konseptual bagi pengembangan kajian dan penelitian empiris lanjutan di bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dalam penelitian ini menyajikan temuan yang diperoleh melalui kajian literatur terhadap jurnal ilmiah nasional periode 2020–2025 yang membahas *Civic Knowledge* dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan. Analisis difokuskan pada aspek-aspek utama *Civic Knowledge* sebagai elemen kognitif kewarganegaraan yang berperan penting dalam pembentukan warga negara demokratis. Setiap aspek dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pemaknaan *Civic Knowledge*, dimensi pengetahuan kewarganegaraan yang menyusunnya, peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan *Civic Knowledge*, serta relevansi *Civic Knowledge* dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia berdasarkan hasil studi literatur.

Civic Knowledge sebagai Unsur Esensial dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa *Civic Knowledge* secara konsisten diposisikan sebagai unsur esensial dalam Pendidikan Kewarganegaraan karena berkaitan langsung dengan pembentukan pemahaman rasional warga negara mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic Knowledge* tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam pembelajaran kewarganegaraan, tetapi menjadi inti yang menentukan kualitas kesadaran kewarganegaraan peserta didik (Armizah, 2020; Nugraha & Elan, 2024). Pendidikan Kewarganegaraan berpotensi kehilangan makna substantif apabila tidak mampu membekali peserta didik dengan pemahaman kewarganegaraan yang memadai dan kontekstual (Maulana, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *Civic Knowledge* berperan sebagai penghubung antara pemahaman normatif kewarganegaraan dan praktik demokrasi dalam kehidupan sosial. Individu dengan *Civic Knowledge* yang baik cenderung mampu memahami mekanisme demokrasi, sistem hukum, serta proses pengambilan keputusan publik secara lebih kritis dan rasional (Hartino & Adha, 2020; Tuharea, 2022). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat diukur hanya melalui capaian akademik, tetapi juga melalui kualitas pemahaman kewarganegaraan yang membentuk cara berpikir warga negara. Dalam konteks pendidikan tinggi, *Civic Knowledge* menjadi indikator penting kedewasaan intelektual kewarganegaraan mahasiswa sebagai warga negara dewasa. Mahasiswa diposisikan sebagai subjek yang diharapkan mampu merefleksikan konsep kewarganegaraan dalam pemikiran kritis dan partisipasi sosial yang bertanggung jawab (Jamaludin & Alanur, 2021; Cahyono et al., 2023). Penguatan *Civic Knowledge* pada mahasiswa memiliki implikasi langsung terhadap kualitas partisipasi demokratis dan kesadaran kewarganegaraan di masa depan (Jayadiputra et al., 2023).

Civic Knowledge dalam Pembentukan Warga Negara Demokratis

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Civic Knowledge* tersusun atas beberapa dimensi pengetahuan kewarganegaraan yang saling berkaitan dan berkontribusi dalam pembentukan warga negara demokratis. Dimensi pemahaman terhadap hukum, konstitusi, dan aturan menjadi elemen utama karena membentuk kesadaran warga negara mengenai batasan, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan bernegara (Arfianti & Kurniawan, 2024). Pemahaman tersebut mendorong kepatuhan hukum yang didasarkan pada kesadaran rasional, bukan sekadar kepatuhan formal. Dimensi pemahaman terhadap nilai demokrasi dan keberagaman juga menjadi aspek penting dalam *Civic Knowledge*, terutama dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. *Civic Knowledge* memungkinkan warga negara memahami prinsip pluralisme, toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian dari kehidupan demokratis (Kollo et al., 2024; Shorunnuha et al., 2024). Pemahaman ini berperan dalam mencegah sikap eksklusif dan memperkuat kohesi sosial dalam kehidupan berbangsa.

Selain itu, *Civic Knowledge* mencakup pemahaman mengenai tanggung jawab sosial dan kepentingan umum. Warga negara dengan *Civic Knowledge* yang memadai cenderung memahami pentingnya keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan (Oktavia, 2024). Dimensi ini menunjukkan bahwa *Civic Knowledge* tidak hanya berdampak pada aspek kognitif individual, tetapi juga membentuk orientasi sosial warga negara terhadap kepentingan bersama. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologis negara juga merupakan bagian integral dari *Civic Knowledge* warga negara Indonesia. *Civic Knowledge* berfungsi sebagai kerangka berpikir yang menjaga konsistensi antara nilai Pancasila dan praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari (Jayadiputra et al., 2023; Suriaman et al., 2024). Dengan demikian, *Civic Knowledge* berperan dalam membentuk warga negara demokratis yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan *Civic Knowledge*

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam mengembangkan *Civic Knowledge* peserta didik melalui proses pembelajaran yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi tentang negara dan sistem politik, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan pemahaman kewarganegaraan yang kritis dan reflektif (Maulana, 2025; Nugraha & Elan, 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dirancang secara partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan *Civic Knowledge* peserta didik. Pendekatan pembelajaran berbasis diskusi, studi kasus, dan analisis isu aktual memungkinkan peserta didik mengaitkan konsep kewarganegaraan dengan realitas sosial dan politik yang dihadapi (Jamaludin & Alanur, 2021; Armizah, 2020). Proses tersebut mendorong peserta didik untuk memahami kewarganegaraan secara lebih mendalam dan kontekstual.

Selain pembelajaran di kelas, lingkungan pendidikan juga berperan dalam penguatan *Civic Knowledge* peserta didik. Budaya akademik, pemanfaatan media digital, serta aktivitas ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang berkaitan dengan kehidupan demokratis turut memperkaya pemahaman kewarganegaraan (Hartino & Adha, 2020; Kollo et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan *Civic Knowledge* memerlukan pendekatan yang holistik dan tidak terbatas pada pembelajaran formal semata. Literatur juga mengungkapkan bahwa pengembangan *Civic Knowledge* masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi metode pembelajaran yang bersifat hafalan dan kurangnya pengaitan materi dengan konteks aktual. Kondisi tersebut menyebabkan *Civic Knowledge* yang terbentuk bersifat dangkal dan kurang aplikatif (Cahyono et al., 2023; Nurfaizah et al., 2024). Temuan ini menunjukkan perlunya inovasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada penguatan pemahaman kewarganegaraan kritis.

***Civic Knowledge* dan Tantangan Demokrasi Kontemporer di Indonesia**

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Civic Knowledge* memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia. Fenomena seperti rendahnya literasi politik, meningkatnya disinformasi, serta melemahnya partisipasi demokratis sering dikaitkan dengan keterbatasan pemahaman kewarganegaraan warga negara (Hartino & Adha, 2020; Maulana, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat *Civic Knowledge* warga negaranya. *Civic Knowledge* memungkinkan warga negara menyikapi perbedaan pandangan dan kepentingan secara rasional serta mengedepankan dialog dalam kehidupan demokratis. Warga negara dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik cenderung bersikap kritis, toleran, dan bertanggung jawab dalam menyikapi isu-isu

kebangsaan dan politik (Kollo et al., 2024; Oktavia, 2024). Peran ini menempatkan *Civic Knowledge* sebagai penopang rasionalitas demokrasi.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, *Civic Knowledge* berperan dalam menjaga persatuan nasional melalui pemahaman terhadap nilai Pancasila, keberagaman, dan kepentingan bersama. Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil mengembangkan *Civic Knowledge* mampu menjadi benteng terhadap berkembangnya konflik sosial berbasis identitas dan polarisasi politik (Suriaman et al., 2024; Shorunnuha et al., 2024). Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam memperkuat *Civic Knowledge* mahasiswa sebagai calon pemimpin dan agen perubahan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang berorientasi pada penguatan pemahaman kewarganegaraan kritis dapat berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sadar secara demokratis (Jayadiputra et al., 2023; Puspitaningrum et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur terhadap jurnal ilmiah nasional periode 2020–2025, dapat disimpulkan bahwa *Civic Knowledge* merupakan komponen kognitif yang esensial dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan memiliki implikasi signifikan terhadap pembentukan warga negara demokratis. *Civic Knowledge* tidak hanya berkaitan dengan penguasaan konsep normatif mengenai negara, hukum, dan sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk cara berpikir rasional warga negara dalam memahami, menilai, dan merespons dinamika kehidupan demokratis. Pemahaman kewarganegaraan yang memadai menjadi prasyarat bagi terbentuknya partisipasi demokratis yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Civic Knowledge* berkontribusi langsung terhadap pembentukan warga negara demokratis melalui pemahaman terhadap hukum dan konstitusi, nilai-nilai demokrasi, keberagaman, tanggung jawab sosial, serta internalisasi nilai Pancasila. Dimensi-dimensi *Civic Knowledge* tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir kewarganegaraan yang memengaruhi sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan publik. Dengan demikian, kualitas kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh kemauan berpartisipasi, tetapi juga oleh kedalaman pemahaman kewarganegaraan yang dimiliki.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mengembangkan *Civic Knowledge* melalui proses pembelajaran yang terencana, kontekstual, dan partisipatif. Pendekatan pembelajaran yang mendorong diskusi kritis, analisis isu aktual, serta keterkaitan antara teori dan realitas sosial terbukti lebih efektif dalam memperkuat pemahaman kewarganegaraan peserta didik. Selain pembelajaran di kelas, lingkungan pendidikan dan budaya akademik juga berkontribusi dalam memperkaya *Civic Knowledge* sebagai bagian dari pengalaman kewarganegaraan yang utuh. Dalam konteks demokrasi kontemporer Indonesia, penguatan *Civic Knowledge* menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Tantangan berupa rendahnya literasi politik, meningkatnya disinformasi, polarisasi sosial, serta melemahnya partisipasi demokratis menunjukkan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada penguatan pemahaman kewarganegaraan kritis. *Civic Knowledge* berperan sebagai penopang rasionalitas demokrasi dan sebagai mekanisme internal yang menjaga konsistensi antara nilai-nilai Pancasila dan praktik demokrasi. Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan *Civic Knowledge* perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam perumusan kurikulum dan praktik pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan kajian literatur dengan penelitian empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *Civic Knowledge* dalam konteks pembelajaran dan kehidupan demokratis warga negara Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman *Civic Knowledge* dari sekadar penguasaan pengetahuan faktual mengenai sistem politik, hukum, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, dan Pancasila menjadi kapasitas epistemik yang memungkinkan warga negara memahami, mengevaluasi, dan merespons persoalan publik secara rasional dan bertanggung jawab. Kajian terdahulu cenderung menempatkan *Civic Knowledge* sebagai salah satu komponen kognitif dalam Pendidikan Kewarganegaraan, sementara keterkaitannya dengan kemampuan warga negara menghadapi ekosistem informasi yang ditandai oleh disinformasi, polarisasi politik, dan kompleksitas isu publik belum banyak dikonstruksi secara integratif. Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa *Civic Knowledge* berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan kewarganegaraan, literasi politik, evaluasi informasi, dan pengambilan keputusan demokratis, sehingga kualitas warga negara demokratis tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan kewarganegaraan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menilai informasi, memahami kepentingan publik, membangun argumentasi berbasis bukti, serta mengambil posisi secara kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini memperluas konseptualisasi *Civic Knowledge* sebagai kapasitas kewarganegaraan yang bersifat kritis, aplikatif, dan responsif terhadap tantangan demokrasi digital, sekaligus memberikan dasar bagi transformasi Pendidikan Kewarganegaraan dari orientasi transfer pengetahuan menuju pengembangan kemampuan epistemik yang menopang praktik demokrasi yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, C., & Kurniawan, N. A. (2024). Hubungan Antara *Civic Knowledge* Dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Departemen Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. *Lentera Ilmu*, 1(1), 1-14.
- Armizah, A. (2020). Meningkatkan *Civic Knowledge* siswa melalui model pembelajaran controversial issues di kelas IX A MTsN 01 Kepahiang. *Jurnal Literasiologi*, 4(2).
- Cahyono, C., Danial, E., Rahmat, R., & Masyitoh, I. (2023). Meningkatkan *Civic Knowledge* Mahasiswa Melalui Model Pembelajaran Blended Learning Dengan Sistem Asynchronous. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2).
- Handayani, M. I., Haryanto, H., & Wibowo, A. (2022). Project Citizen Model in Citizenship Education and Its Impact on Critical Thinking Skills for Elementary School Teacher Education Students. *International Journal of Elementary Education*, 6(2), 276-281.
- Hartino, A. T., & Adha, M. M. (2020). Optimalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya meningkatkan *Civic Knowledge* peserta didik melalui media sosial. In *E Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2020* (pp. 169-176). Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Isnaen, M. A., Lestari, D., & Hamzah, M. I. (2025). The Impact Of The Pancasila Student Profile Strengthening Project On Employment Themes On Improving The Soft Skills Of Vocational High School. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 8(3), 206-214.
- Jamaludin, J., & Alanur, S. N. (2021). Pengembangan *Civic Knowledge* dan literasi informasi di masa pandemi covid-19 melalui case method pada mahasiswa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(01), 28-36.
- Jayadiputra, E., Karim, A. A., Sapriya, S., & Rahmat, R. (2023). The Pancasila and Civic Education curriculum model at 21st century. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 65-74.
- Kollo, F. L., Tapatab, S. M., Famau, W. W., & Oba, P. F. N. (2024). Literasi Kewarganegaraan Sebagai Strategi Dalam Mengembangkan *Civic Knowledge*. *Jurnal Lazuardi*, 7(3), 17-21.

- Kurniawan, M. W. (2021). Basic Concepts Of Internalizing National Insights In SMAN 9 Malang City. *Jed (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(2), 317-328.
- Kurniawan, M. W., Darmawan, C., Sapriya, S., & Syaifullah, S. (2025). Analisis Model Literasi Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Kebangsaan Peserta Didik. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1).
- Maulana, R. B. (2025). Urgensi Dan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Kompetensi Warga Negara Yang Cerdas Dan Berkarakter Di Era Disrupsi Digital. *Raditya Bintang Maulana*.
- Nanggala, A., Suryadi, K., Darmawan, C., Saepudin, E., & Avila, R. V. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan berbasis civic philanthropy untuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 101-111.
- Nugraha, M., & Elan, E. (2024). Bagaimana Menciptakan Pembelajaran Yang Memuat Pengetahuan, Keterampilan Dan Kebajikan Warga Negara? *Jurnal Obsesi: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 8(5), 1048-1056.
- Nurfaizah, A. P., Faisal, M., & Ramadhani, F. M. (2024). Pengaruh Penerapan Model Value Clarification Technique (Vct) Terhadap *Civic Knowledge* Siswa Pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila Di Kelas V Upt Sdn 25 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 145-153.
- Oktavia, M. P. (2024). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Di Era Globalisasi Melalui Sosialisasi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(6), 200-207. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i6.2084>
- Puspitaningrum, D., Sutrisno, S., Sutrisno, S., & Fadilah, A. N. (2025). Fostering *Civic Knowledge* in Students with Special Needs: Approaches and Strategies for Inclusive Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 17(1), 1274-1285.
- Shorunnuha, I., Widiadi, A. N., & Hudiyanto, R. R. (2024). History Education as an Effort to Internalize *Civic Knowledge*: A Case Study at an Islamic-Based Private Senior High School in Malang City. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 8(1), 93-109
- Suriaman, S., Komalasari, K., Nurgiansah, T. H., Prayogi, R., & Bribin, M. L. (2024). Civic Education as an Integrated Knowledge System in the 21st Century: A Reform Approach. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(3), 423-443.
- Tuharea, A. F. R. H. J. (2022). Implementasi *Civic Knowledge* Dalam Pemilihan Ketua OSIS di Sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).